



Implementasi Program Digitalisasi Desa (Digides) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka

Dewa Nyoman Juniarta^{1*}, Mardiana², Muhammad Hidayat Djabbari³

^{1,2,3}*Universitas Sembilanbelas November Kolaka*

Email: dewanyomanjuniarta023@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDes) dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap enam informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, terdiri atas aparat desa, operator DIGIDes, dan masyarakat pengguna layanan; data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis implementasi menggunakan empat indikator George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DIGIDes telah berjalan melalui keempat indikator tersebut. Bukti empiris dari pengguna layanan menunjukkan bahwa pelayanan dirasakan lebih cepat dan praktis dibandingkan sebelum menggunakan DIGIDes, data administrasi lebih mudah ditelusuri, dan masyarakat memperoleh pendampingan langsung ketika mengalami kesulitan. Namun, manfaat tersebut belum merata karena sosialisasi hanya dilakukan dua kali dalam setahun, panduan penggunaan belum tersedia, anggaran terbatas, dan jaringan internet belum stabil. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa DIGIDes berkontribusi pada perbaikan proses pelayanan administrasi, terutama dalam aspek kecepatan, kemudahan, dan pendampingan, meskipun optimalisasi implementasi masih diperlukan.

Kata Kunci: implementasi; program; Digitalisasi Desa (DIGIDes); dalam meningkatkan pelayanan publik.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Village Digitalization Program (DIGIDes) in improving public services in Gunung Sari Village, Watubangga District, Kolaka Regency, as well as to identify the inhibiting factors in its implementation. The study uses a qualitative approach with a descriptive type. Primary data were collected through interviews and observations of six informants determined using purposive sampling techniques, consisting of village officials, village digital operators, and community members who use the services, while secondary data were obtained through documentation studies. Data analysis was conducted based on four indicators of policy implementation according to George C. Edwards III, namely communication, resources, disposition,

and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of the DIGIDes Program has been carried out through these four aspects. Communication is carried out through face-to-face socialization as well as WhatsApp and Facebook media, but it is still not optimal and there is no guide for using digital services. Resources are supported by human resources, facilities, and infrastructure, but there are still budget limitations and an unstable internet network. In terms of disposition, village officials demonstrate a positive attitude, responsibility, and commitment in providing services and assistance to the community. In terms of bureaucratic structure, the division of tasks and service mechanisms have been carried out clearly, but there is still no SOP for the implementation of DIGIDes. Thus, the implementation of the DIGIDes Program in Gunung Sari Village has been running quite well in supporting public services, although there are still several obstacles that need to be improved and optimized.

Keywords: *implementation; program; Village Digitalization (DIGIDes); in improving public services.*

Pendahuluan

Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Transformasi digital memungkinkan pemerintah meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas transparansi, serta menyediakan layanan publik secara daring yang lebih cepat dan mudah diakses. Namun, transformasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan akses internet, dan rendahnya literasi digital masyarakat (Fitriyanti, 2024). Salah satu bentuk nyata dari transformasi digital dalam pemerintahan adalah penerapan Electronic Government (E-Government), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik melalui platform digital, sehingga interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih praktis, terbuka, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat (Djabbari et al., 2024).

Di Indonesia, transformasi digital menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah pedesaan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih mengalami keterbatasan akses internet dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga menyebabkan kesenjangan digital yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan konsep desa digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan berbasis teknologi, dan menjadikan digitalisasi desa sebagai salah satu prioritas nasional, yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang fokus penggunaan dana desa tahun 2026 untuk pengembangan infrastruktur

internet dan layanan berbasis digital (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2025). Program digitalisasi desa juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi, mempermudah akses layanan publik, memperkuat transparansi penggunaan dana desa, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Saputra et al., 2024; Anirwan et al., 2024). Landasan hukum digitalisasi desa turut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pemerintah desa mengembangkan sistem informasi desa (Setiawan et al., 2018).

Secara nasional, penerapan digitalisasi desa terus mengalami perkembangan; hingga pertengahan tahun 2025, program digitalisasi desa di wilayah 3T telah mencakup sekitar 41% dari target 10.000 desa yang dikelola pemerintah (Untari, 2025). Di tingkat regional, Provinsi Sulawesi Tenggara turut menunjukkan perkembangan, dengan sekitar 527 dari 1.915 desa telah memanfaatkan sistem administrasi dan layanan publik berbasis digital (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024), termasuk beberapa desa di Kabupaten Kolaka. Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, merupakan salah satu desa yang mulai menerapkan Program Digitalisasi Desa (DIGIDes) sejak tahun 2021 melalui situs resmi desa (Digitaldesa.id, n.d.). Implementasi program tersebut mencakup berbagai fitur digital, seperti pelayanan surat-menyurat (surat keterangan usaha, surat pengantar nikah, surat keterangan tidak mampu, formulir permohonan KTP secara daring) serta website profil desa yang menyediakan informasi pembangunan dan transparansi anggaran.

Meskipun demikian, implementasi DIGIDes di Desa Gunung Sari masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya literasi digital, keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya tata kelola digital, sehingga sebagian pelayanan publik masih dilakukan secara manual. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDes) di Desa Gunung Sari menjadi penting dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi serta memahami bagaimana pelaksanaan program tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan implementasinya.

Secara konseptual, implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan konkret melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam penelitian ini, implementasi Program DIGIDes dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana program dilaksanakan oleh pemerintah desa serta bagaimana pelaksanaan tersebut berkaitan dengan perubahan yang dirasakan pengguna layanan. Dengan demikian, peningkatan pelayanan publik tidak hanya disimpulkan dari keberadaan aplikasi, tetapi diperkuat melalui temuan wawancara mengenai kecepatan, kemudahan, kejelasan alur, dan pendampingan pelayanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang menganut aliran fenomenologis dan sesuai untuk memahami implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDes) secara mendalam dan kontekstual. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, mulai bulan Januari 2026.

Fokus penelitian diarahkan pada empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Harsono, 2002). Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, terdiri dari dua orang aparat Desa Gunung Sari, satu orang operator digital desa, dan tiga orang warga/masyarakat pengguna layanan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Analisis data mengikuti tiga tahapan menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen di Desa Gunung Sari, implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDes) dianalisis melalui empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Selain menganalisis proses implementasi, penelitian juga menelusuri bukti empiris mengenai perubahan yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Bukti Empiris Peningkatan Pelayanan Publik, berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan adanya perubahan yang dirasakan pengguna layanan setelah pemanfaatan DIGIDes. Salah satu informan masyarakat (KS, 39 tahun) menyatakan bahwa “dibandingkan sebelum menggunakan DIGIDes, sekarang proses pelayanan terasa lebih cepat dan lebih praktis.

Data yang dibutuhkan juga lebih mudah dicari karena sudah tersimpan di dalam sistem.” Informan yang sama menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengurus surat atau administrasi lainnya. Temuan lain juga menunjukkan bahwa alur pelayanan lebih mudah diikuti karena petugas menjelaskan persyaratan dan tahapan secara langsung. Dengan demikian, bukti empiris peningkatan pelayanan dalam penelitian ini terutama terlihat pada persepsi pengguna mengenai kecepatan, kepraktisan, kemudahan menemukan data, kejelasan alur, dan respons aparatur. Namun, temuan tersebut tidak berarti seluruh pelayanan telah sepenuhnya beralih ke sistem digital atau selalu lebih cepat, karena gangguan jaringan masih dapat memperlambat proses pelayanan.

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gunung Sari telah menyampaikan informasi mengenai Program DIGIDes melalui sosialisasi tatap muka di kantor desa serta media WhatsApp dan Facebook. Operator DIGIDes menjelaskan bahwa sosialisasi baru dilaksanakan dua kali dalam setahun dan belum tersedia panduan penggunaan secara tertulis maupun video tutorial. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengaku memperoleh penjelasan yang cukup jelas, tetapi sebagian masyarakat lain, khususnya warga lanjut usia dan warga yang kurang aktif menggunakan media sosial, masih mengalami kesulitan karena tidak mengikuti sosialisasi.

Dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi yang efektif ditandai oleh penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada seluruh kelompok sasaran. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi Program DIGIDes di Desa Gunung Sari sudah cukup baik dari sisi kejelasan informasi yang disampaikan, tetapi belum optimal dari sisi keberlanjutan dan jangkauan, karena frekuensi sosialisasi yang rendah serta ketiadaan media panduan tertulis atau video menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Temuan mengenai keterbatasan jangkauan sosialisasi ini sejalan dengan penelitian Aisyah dan Suriyani (2024) di Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang menemukan bahwa sosialisasi program digitalisasi desa yang tidak rutin dan tidak merata menyebabkan sebagian warga lebih memilih datang langsung ke kantor desa dibandingkan menggunakan layanan digital. Hal serupa juga ditemukan oleh Djabbari et al. (2024) dalam implementasi e-government berbasis website di Desa Tondowolio, Kabupaten Kolaka, yang mengungkapkan

bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa turut menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat. Kesamaan temuan pada tiga lokasi penelitian yang berbeda ini memperkuat dugaan bahwa keterbatasan frekuensi dan jangkauan sosialisasi merupakan tantangan umum dalam implementasi digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa, bukan sekadar persoalan lokal di Desa Gunung Sari semata.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi Program DIGIDes secara umum sudah cukup memadai, dengan operator DIGIDes yang telah mendapat pelatihan dan aparatur desa yang memiliki pembagian tugas jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama; berdasarkan surat penawaran layanan DIGIDes, pengembangan dan pengelolaan sistem membutuhkan anggaran sekitar Rp33.900.000 per tahun yang bersumber dari dana desa, sementara anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan tersebut. Dari sisi fasilitas, Pemerintah Desa Gunung Sari telah menyediakan tiga unit komputer, satu unit printer, dua unit flashdisk, dan jaringan Wi-Fi untuk mendukung pelayanan berbasis digital, meskipun kualitas jaringan internet masih kerap tidak stabil dan memperlambat proses pelayanan.

Menurut Edwards III, sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, serta sarana dan prasarana yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Harsono, 2002). Berdasarkan temuan tersebut, indikator sumber daya dalam implementasi Program DIGIDes di Desa Gunung Sari telah berjalan cukup baik dari sisi sumber daya manusia dan fasilitas dasar, namun keterbatasan anggaran serta kualitas jaringan internet yang belum stabil masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian, khususnya dari Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam penguatan dukungan pendanaan dan infrastruktur. Kendala keterbatasan sarana dan anggaran yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Aisyah dan Suriyani (2024) di Desa Kapar, yang menyebutkan bahwa fasilitas teknologi seperti komputer, printer, dan jaringan internet belum sepenuhnya memadai dan perlu terus ditingkatkan. Djabbari et al. (2024) turut menegaskan bahwa keterbatasan sarana teknologi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi layanan digital berbasis website di tingkat desa. Konsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, khususnya anggaran dan infrastruktur jaringan, merupakan tantangan struktural yang umum dihadapi desa-desa di

Indonesia dalam mengimplementasikan program digitalisasi, sehingga penguatan dukungan dari pemerintah daerah menjadi kebutuhan yang mendesak.

3. Disposisi

Sikap aparatur Desa Gunung Sari dalam menjalankan Program DIGIDes secara umum positif, dengan komitmen yang tinggi untuk membantu mempercepat pelayanan administrasi meskipun masih terdapat kendala teknis. Aparatur desa juga tetap memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan digital. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat pengguna layanan yang menilai aparat desa ramah, sopan, sabar, dan responsif dalam membantu menyelesaikan proses administrasi hingga tuntas, termasuk saat terjadi kendala jaringan internet.

Menurut Edwards III, disposisi menyangkut pemahaman, penerimaan, dan komitmen para pelaksana kebijakan, yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi (Harsono, 2002). Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi Program DIGIDes di Desa Gunung Sari telah berjalan dengan baik, karena aparatur desa memahami tujuan program, menerima kebijakan digitalisasi sebagai inovasi pelayanan publik, serta menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam melayani masyarakat. Sikap positif dan antusiasme aparatur desa ini sejalan dengan temuan Sindiana dan Rodiyah (2023) pada implementasi Sistem Informasi Desa berbasis website di Desa Dukuh Sari, Kabupaten Sidoarjo, yang menemukan bahwa perangkat desa selaku pengelola sistem menunjukkan antusiasme tinggi dan sangat mendukung arti penting kemudahan pelayanan berbasis elektronik bagi masyarakat, meskipun implementasinya di lokasi tersebut masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi dan sumber daya. Kesamaan pola ini menegaskan bahwa disposisi yang positif dari aparatur pelaksana cenderung menjadi modal awal yang kuat dalam implementasi kebijakan digitalisasi desa, meskipun tidak serta-merta menghilangkan hambatan pada indikator implementasi lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Program DIGIDes di Desa Gunung Sari didukung oleh pembagian tugas yang jelas antarperangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mekanisme pelayanan yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa petugas memberikan arahan mengenai persyaratan dan tahapan yang

harus dilalui. Salah satu informan menyatakan bahwa proses pelayanan “cukup cepat dibandingkan sebelumnya”. Temuan ini memperlihatkan hubungan empiris antara kejelasan alur pelayanan dan manfaat yang dirasakan pengguna, yaitu proses yang lebih mudah diikuti, lebih tertib, dan tidak terlalu berbelit-belit.

Menurut Edwards III, struktur birokrasi yang baik ditandai oleh pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif, serta prosedur operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan (Harsono, 2002). Berdasarkan temuan penelitian, pembagian tugas dan mekanisme pelayanan di Desa Gunung Sari telah membantu menciptakan alur pelayanan yang lebih jelas bagi masyarakat. Bukti empiris berupa pernyataan pengguna mengenai proses yang lebih cepat dan praktis memperkuat temuan tersebut. Meskipun demikian, belum tersedianya SOP tertulis menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih perlu diperkuat.

Sintesis temuan empiris menunjukkan bahwa kontribusi DIGIDes terhadap pelayanan publik terutama dirasakan pada proses administrasi yang lebih cepat dan praktis, kemudahan menemukan data, kejelasan tahapan pelayanan, serta pendampingan aparatur. Bukti tersebut berasal dari wawancara dengan masyarakat pengguna layanan dan didukung oleh observasi peneliti. Pada saat yang sama, penelitian menemukan kondisi yang membatasi manfaat tersebut, yaitu sosialisasi yang belum rutin, belum adanya panduan penggunaan, keterbatasan anggaran, dan jaringan internet yang tidak selalu stabil. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, temuan tersebut diposisikan sebagai bukti empiris mengenai kontribusi dan pengalaman pengguna, bukan sebagai pengukuran statistik atas besarnya peningkatan pelayanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDes) dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi program telah berjalan melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi masih terdapat beberapa kendala.

Dari sisi disposisi, aparatur desa menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap positif, ramah, serta responsif dalam melayani masyarakat, termasuk memberikan pendampingan bagi warga yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital. Dari sisi struktur birokrasi, pembagian tugas dan mekanisme pelayanan telah membantu menciptakan alur pelayanan yang lebih jelas. Bukti empiris dari masyarakat

menunjukkan bahwa proses pelayanan dirasakan lebih cepat dan praktis dibandingkan sebelum menggunakan DIGIDes, data administrasi lebih mudah ditelusuri, dan masyarakat memperoleh bantuan sampai proses selesai. Namun, jaringan internet yang tidak stabil dapat memperlambat pelayanan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Suriyani, E. (2024). Implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDes) dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)*, 7(2), 2073–2088. <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1139>
- Anirwan, Ridwan, R., Firmansyah, & Ismail. (2024). Explorasi implementasi digitalisasi desa: Studi literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1). <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i1.546>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2024). Direktori desa Provinsi Sulawesi Tenggara 2023. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Digitaldesa.id. (n.d.). Profil digitalisasi Desa Gunung Sari. <https://gunungsari.digitaldesa.id/>
- Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi e-government dalam pelayanan publik berbasis website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 158–170. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15588>
- Fitriyanti, E. (2024). The effect of digital transformation on governance in Indonesia: A case study of e-government implementation in public services. *Journal of Political Innovation and Analysis*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.59261/jpia.v1i1.3>
- Harsono, H. (2002). Implementasi kebijakan dan politik. PT Mutiara Sumber Widya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. (2025). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Saputra, A., Syahril, S., Fitriadi, F., Hadi, K., & Harmaini, H. (2024). Digitalisasi desa mandiri. *JPAMI*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35308/jpami.v4i1.9554>
- Setiawan, D. F., Pratama, T. G. W., Nugraha, A. E. P., & Royana, I. F. (2018). Analisis peran UU No. 6 Tahun 2014 di dalam mewujudkan

- administrasi desa yang efektif dan efisien. J-Dinamika, 3(2).
<https://doi.org/10.25047/J-DINAMIKA.V3I2.896>
- Sindiana, D. A., & Rodiyah, I. (2023). Implementation of a website based village information system in the Dukusari Village Government Jabon District. UMSIDA Preprints Server.
<https://doi.org/10.21070/ups.3122>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Untari, P. H. (2025, July 9). Realisasi program 10.000 desa digital Komdigi di 3T capai 41% Juli 2025. Bisnis Indonesia.
<https://teknologi.bisnis.com/read/20250709/101/1891961/realisasi-program-10000-desa-digital-komdigi-di-3t-capai-41-juli-2025>